



PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI LAMPUNG**

 @desdmlampung

 <https://esdm.lampungprov.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2024. sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja ini memuat Latar Belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang berupa capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan kegiatan, telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Perubahan Renja, program dan kegiatan serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) P-APBD Tahun Anggaran 2024.

Bandar Lampung, Oktober 2024

KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
LAMPUNG



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197302222003121010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Perangkat Daerah 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 15

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan
Masyarakat 28

Bab III TUJUAN DAN SASARAN 32

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 33

3.3 Program dan Kegiatan 34

Bab IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN..... 47

4.1 Matriks Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 47

Bab V PENUTUP 56

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja; (2) Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja; (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja; dan (4) Penetapan Perubahan Rencana Kerja.

Perubahan Rencana Kerja merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang disusun per tahun selama kurun waktu lima tahun dan dibuat pada pertengahan tahun di awal triwulan ke empat. Perubahan Rencana Kerja memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Kabupaten/Kota.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang strategis. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah melalui Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

I.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2024 berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tahun Energi;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
 26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 28. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/630/VI.02/HK/2024, tentang

Penyempurnaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 tanggal 30 September 2024;

- 29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, tanggal 2 Oktober 2024;
- 30. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, tanggal 3 Oktober 2024;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mneral Provinsi Lampung adalah merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana P-APBD Provinsi Lampung Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 adalah :

- 1. Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perangkat Daerah serta kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2024.
- 2. Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) tahun 2024.
- 3. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
- 4. Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

I.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2019-2024 yang memuat Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Untuk memahami lebih jelas mengenai Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, maka uraian-uraian yang terdapat pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun anggaran 2024.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2024 yang didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 serta Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dievaluasi pada akhir tahun anggaran dan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja tahun 2024 sebagaimana terlampir.

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tabel T-C.29.										
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024										
Provinsi Lampung										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10	11
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI									
3.29	BIDANG URUSAN									
3.29.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	1582 Orang/Bulan	-	1582 Org/Bln	1582 Org/Bln	100%	1582 Org/Bln	1582 Org/Bln	100%
3.29.01.1.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	6 Laporan	-	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	-



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia	100%	-	-	-	-	100%	100%	-
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	-
3.29.01.1.05.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	-	-	-	-	7 Laporan	7 Laporan	-
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan Peraturan yang ada	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	-	2 Orang	2 Orang	100%	20 orang	20 orang	100%
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan Peraturan yang ada	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga dan Listrik yang di butuhkan	13 Paket	-	15 Paket	15 Paket	100%	25 Paket	25 Paket	100%
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan	460 Paket	-	460 Paket	460 Paket	100%	630 Paket	630 Paket	92,40%
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	-	-	100%
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2347 Paket	-	2347 Paket	2347 Paket	100%	2347 Buah	2347 Buah	100%
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	415 Laporan	-	451 Laporan	451 Laporan	100%	451 Laporan	451 Laporan	100%
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan	-	38 Laporan	38 Laporan	100%	128 Laporan	128 Laporan	100%
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.29.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebeleur yang disediakan	14 Paket	-	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	-	7 Paket	7 Paket	100%	7 Unit	7 Unit	100%

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	-	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	88 unit	-	49 Unit	49 Unit	100%	88 Unit	88 Unit	100%
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
3.29.01.2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	100%	-	3,2%	3,2%	100%	61%	61%	100%
3.29.01.2.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air Tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah	100,0%	-	2,5%	2,5%	100%	67,5%	67,5%	100%
3.29.01.2.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam	44 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	44 Dokumen	44 Dokumen	100%
3.29.01.2.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Jumlah Dokumen Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi	2 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.01.2.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA	100%	-	1,4%	1,4%	100%	45%	45%	100%
3.29.01.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan, serta terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.	15 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	30 Laporan	30 Laporan	100%
3.29.01.3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Peningkatan Pengelolaan Mineral dan Batubara	60%	-	30%	30%	100%	50%	50%	100%
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	7 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut samapai dengan 12 mil yang Terkumpul dan Terolah	7 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
3.29.03.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	22 Laporan	-	22 Perusahaan	22 Perusahaan	100%	22 Laporan	22 Laporan	100%
3.29.03.1.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	11 Laporan	-	11 Perusahaan	11 Perusahaan	100%	11 Laporan	11 Laporan	100%
3.29.01.3.03.04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	11 Laporan	-	11 Perusahaan	11 Perusahaan	100%	11 Laporan	11 Laporan	90,90%

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.01.5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Bauran Energi Daerah	34,80%	-	30,1%	30,1%	100%	33,5%	33,5%	100%
3.29.01.5.03	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari	10%	-	4%	4%	100%	8%	8%	100%
3.29.01.5.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%
	Pengelolaan penyediaan biomassa dan biogas dalam wilayah provinsi	Persentase pengelolaan penyediaan biomassa dan biogas dalam wilayah provinsi	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan dan pemukthairan data potensi biomassa	Jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan dan pemukthairan data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Persentase pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	7 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.01.5.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	9 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen Data guna Penyusunan Neraca Energi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah Orang yang Menerima Manfaat dan Teknologi Konservasi Energi	-	-	-	-	-	300 Orang	300 Orang	100%
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah fasilitas milik Pemerintah yang akan dilakukan efisiensi Energi Listrik	-	-	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat provinsi	Persentase pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat provinsi	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaansosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	7 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3.29.01.6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	100%	-	40%	40%	100%	80%	80%	100%
3.29.01.6.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100%	-	40%	40%	100%	80%	80%	100%
3.29.01.6.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	20 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

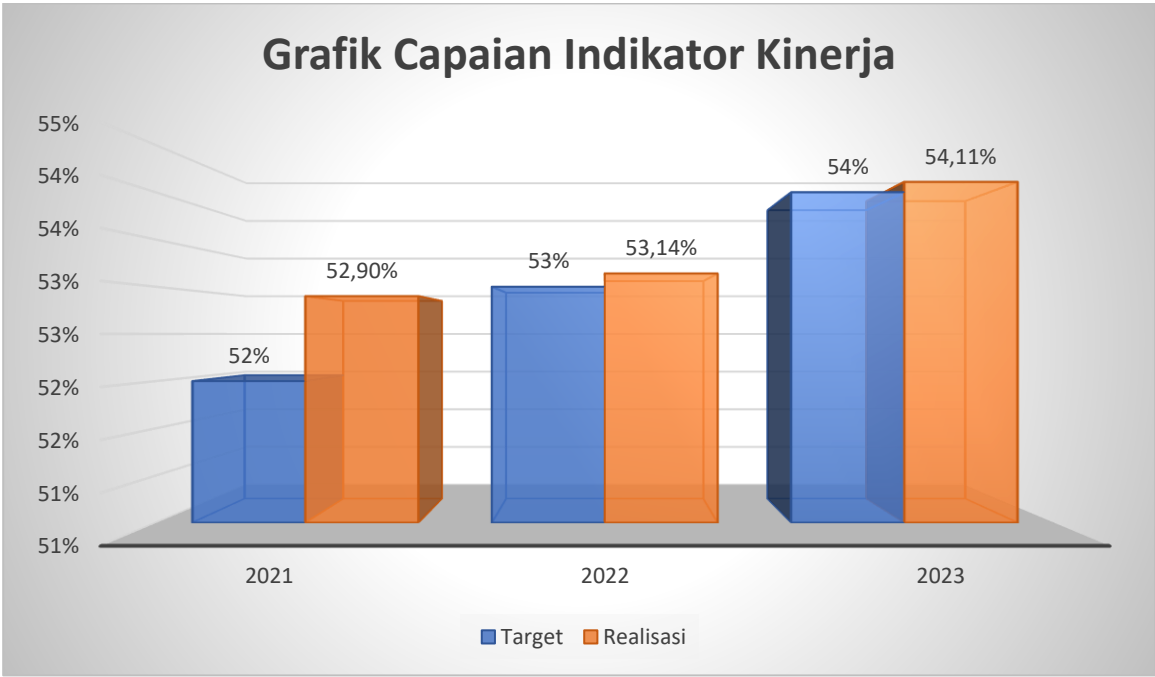
3.29.01.6.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung	100%	-	40%	40%	100%	80%	80%	100%
3.29.01.6.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	6 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	91,66%
3.29.01.6.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Persentase Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun	100%	-	40%	40%	100%	80%	80%	100%
3.29.01.6.05.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	7 Laporan	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%
3.29.01.6.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan yang teranggarkan	100%	-	40%	40%	100%	80%	80%	100%
3.29.01.6.06.2	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	50 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	0%
3.29.01.6.06.4	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	-	-	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	100%
3.29.01.6.06.7	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah dokumen Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	6 Dokumen	-	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada sasaran strategis dan Indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama dalam rangka untuk Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.

Gambar 2.1

Grafik Capaian Indikator Kinerja T.A 2021-2023



2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tidak terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain:

1. Masih ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik;
2. Potensi energi baru terbarukan di Provinsi Lampung cukup besar, namun pemanfaatanya belum optimal, sementara pengembangan energi panas bumi masih mengalami kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan dan kurangnya dukungan infrastruktur;
3. Masih rendahnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB;
4. Rendahnya kontribusi sektor LGA terhadap PDRB;

5. Selama ini anggapan sebagian masyarakat terhadap kegiatan penambangan, dianggap merusak lingkungan. Padahal sebenarnya kegiatan usaha pertambangan hanya merubah bentang alam sesuai peruntukannya, dan bahkan hal ini selalu diisyaratkan pada saat pengajuan izin usaha pertambangan dan hal ini tercantum pada RKL/UPL dan amdal sebelum kegiatan penambangan dilaksanakan;
6. Kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) masih terjadi;
7. Jumlah dan debit mata air di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan selama beberapa dekade ini seiring dengan banyak berubahnya fungsi lahan di daerah resapan;
8. Masih terdapat daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengeboran air tanah dalam rangka mendorong pengembangan wilayah tertinggal;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tabel 2.3 (T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Provinsi Lampung

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 0000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 0000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI				31.909.710.150,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI				20.633.454.418,50	
	BIDANG URUSAN					BIDANG URUSAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada	100%	17.700.000.150,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada	100%	16.303.454.418,50	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusunn	100%	425.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusunn	100%	167.356.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen	125.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	16.126.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	116.230.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	50.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	35.000.000,00	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas ESDM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	13.577.117.685,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	13.666.521.018,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas ESDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1582 Orang/Bulan	13.547.117.685,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas ESDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	582 Org/Bln	13.656.401.018,00	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas ESDM	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	6 Laporan	30.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas ESDM	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	6 Laporan	10.120.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia	100%	78.369.550,00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia	100%	50.000.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	53.369.550,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	35.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada	100%	150.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada	100%	100.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas ESDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	150.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas ESDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	100.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada	100%	1.302.052.915,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada	100%	799.622.485,50	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas ESDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30 Paket	40.884.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas ESDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 Paket	16.790.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas ESDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	790 Paket	97.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas ESDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	460 Paket	46.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	125 Dokumen	25.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	0,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Dinas ESDM	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	2347 Paket	202.500.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Dinas ESDM	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	2347 Buah	168.432.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	451 Laporan	35.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	451 Laporan	25.775.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan	901.168.915,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan	542.625.485,50	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	150.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	143.821.000,00	
Pengadaan mebel	Dinas ESDM	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 unit	50.000.000,00	Pengadaan mebel	Dinas ESDM	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	14 Paket	72.293.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas ESDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	8 unit	100.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas ESDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	71.528.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	733.060.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	724.833.915,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas ESDM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	250.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas ESDM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	197.558.915,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 laporan	482.260.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan	527.275.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.284.400.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	651.300.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas ESDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	859.400.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas ESDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	393.080.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas ESDM	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	105 unit	75.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas ESDM	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	88 Unit	44.220.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas ESDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	350.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas ESDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	214.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	100%	2.620.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	100%	600.000.000,00	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah	100,0%	1.070.000.000,00	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah	100%	480.000.000,00	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam	44 Dokumen	220.000.000,00	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam	44 Dokumen	290.480.000,00	
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen	600.000.000,00	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi	2 Dokumen	189.520.000,00	
	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Provinsi Lampung	Jumlah pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi Lampung	15 Laporan	250.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Penatusahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	Persentase perusahaan pemanfaatan air tanah yang terawasi	100%	900.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Penetapan prosedur dan persyaratan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen SOP layanan Rekom-tek pengusahaan air tanah	2 Dokumen	150.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Penyusunan rekomendasi layanan perizinan dan informasi izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Rekom-tek yang diterbitkan	100 Rekom-tek	500.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan, pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	Provinsi Lampung	Jumlah survey pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran dan penggalian	15 Lokasi	250.000.000,00	-	-	-	-	0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA	100%	650.000.000,00	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA	100%	120.000.000,00	
	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	5 Dokumen	250.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	Provinsi Lampung	Jumlah laporan hasil penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	1 Laporan	150.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	250.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	15 Laporan	120.000.000,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	60%	750.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	60%	858.475.200,00	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	7 dokumen	315.000.000,00	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	7 dokumen	358.475.200,00	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	7 dokumen	315.000.000,00	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	7 dokumen	358.475.200,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	22 Laporan	435.000.000,00	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	22 Laporan	500.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	11 Laporan	210.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	11 Laporan	250.000.000,00	
	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	11 Laporan	225.000.000,00	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	11 Laporan	250.000.000,00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Persentase Bauran Energi Daerah	34,80%	3.925.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Persentase Bauran Energi Daerah	34,80%	1.400.000.000,00	
	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari	10%	400.000.000,00	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari	8%	300.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	12 Laporan	400.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	12 Laporan	300.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

	Penatausahaan izin langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas	Provinsi Lampung	Persentase izin pemanfaatan panas bumi yang diawasi dan dievaluasi	100%	700.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas	Provinsi Lampung	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas	8 Dokumen	200.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas	4 Laporan	200.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas	4 Dokumen	300.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Penatausahaan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi	Provinsi Lampung	Persentase badan usaha yang memiliki izin surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang	8%	200.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan	8 Dokumen	200.000.000,00	-	-	-	-	-	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

	-	-	-	-	0,00	Pengelolaan penyediaan biomassa dan biogas dalam wilayah provinsi	Provinsi Lampung	Persentase pengelolaan penyediaan biomassa dan biogas dalam wilayah provinsi	100%	700.000.000,00	
	-	-	-	-	0,00	Penyusunan dan pemukthairan data potensi biomassa	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	42.000.000,00	
	-	-	-	-	0,00	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Provinsi Lampung	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	3 Laporan	99.000.000,00	
	-	-	-	-	0,00	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Provinsi Lampung	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	3 Laporan	530.000.000,00	
	-	-	-	-	0,00	Penyusunan dan pemukthairan data potensi biogas	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	29.000.000,00	
	-	-	-	-	0,00	Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Provinsi Lampung	Persentase pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	100%	120.000.000,00	
	-	-	-	-	0,00	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	7 Laporan	120.000.000,00	
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100%	2.625.000.000,00	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100%	188.000.000,00	
	-	-	-	-	0,00	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Provinsi Lampung	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	9 Unit	50.000.000,00	
	-	-	-	-	0,00	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Provinsi Lampung	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	138.000.000,00	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Data guna Penyusunan Neraca Energi Daerah	1 Dokumen	650.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Provinsi Lampung	Jumlah Orang yang menerima manfaat dan teknologi Konservasi Energi	300 Orang	1.325.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Provinsi Lampung	Jumlah Penerima Manfaat Fasilitas/Gedung milik Pemerintah yang dilakukan Efisiensi Energi Listrik	4Unit	650.000.000,00	-	-	-	-	0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

	-	-	-	-	0,00	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat provinsi	Provinsi Lampung	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat provinsi	100%	92.000.000,00	
	-	-	-	-	0,00	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Provinsi Lampung	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	7 Laporan	92.000.000,00	
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	100%	6.914.710.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	80%	1.471.524.800,00	
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi	100%	350.000.000,00	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi	80%	250.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	8 Laporan	350.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	20 Laporan	250.000.000,00	
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung	100%	150.000.000,00	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung	80%	100.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	150.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	6 Laporan	100.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri		Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun	100%	210.000.000,00	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri		Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun	100%	621.524.800,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	7 Laporan	210.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	7 Laporan	621.524.800,00	
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan		Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun	100%	6.204.710.000,00	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan		Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun	80%	500.000.000,00	
	Penetapan penerimaan manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Provinsi Lampung	Jumlah penerimaan manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	3000 Keluarga	4.000.000.000,00	-				0,00	
	Pengendalian dan pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu	Provinsi Lampung	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu	13 Laporan	400.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan	Provinsi Lampung	Jumlah sarana yang terbangun dari penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan	3 Unit	1.004.710.000,00	Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan	Provinsi Lampung	Jumlah sarana yang terbangun dari penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan	50 Unit	250.000.000,00	
	Pengendalian dan pengawasan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang/daerah terpencil dan pedesaan	Provinsi Lampung	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang/daerah terpencil dan pedesaan	13 Laporan	250.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	13 Dokumen	300.000.000,00	-	-	-	-	0,00	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen yang terkumpul terkait Data Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	13 Dokumen	250.000.000,00	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen yang terkumpul terkait Data Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	6 Dokumen	250.000.000,00	
	Jumlah Pagu				31.909.710.150,00	Jumlah Pagu				20.633.454.418,50	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menyusun usulan program / kegiatan tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan rapat musrembang tingkat kabupaten/kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dapat dilihat pada. Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung					
NO	Rancangan Awal RKPD				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI				
	BIDANG URUSAN				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas ESDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1582 Org/BlN	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas ESDM	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	6 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia	100%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada	100%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas ESDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada	100%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas ESDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas ESDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	790 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	125 Dokumen	
	Penyediaan Bahan/Material	Dinas ESDM	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	2347 Buah	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	451 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan	



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
	Pengadaan mebel	Dinas ESDM	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas ESDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas ESDM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas ESDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas ESDM	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	105 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas ESDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	
II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN		Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	100%	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah	100,0%	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam	44 Dokumen	
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen	
	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Provinsi Lampung	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	15 Laporan	
	Penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam daera Provinsi		Persentase Perusahaan pemanfaatan air tanah yang terawasi	100%	
	Penetapan prosedur dan persyaratan izin pengeboran, izin penggalian, dan izin pengusahaan air tanah.	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen SOP layanan Rekom-tek pengusahaan air tanah	2 Dokumen	
	Penyusunan rekomendasi layanan perizinan dan informasi izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Rekom-tek yang diterbitkan	100 Rekom-tek	
	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah	Provinsi Lampung	Jumlah survey pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah	15 Lokasi	

	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA	100%	
	Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi nilai perolehan air tanah	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	5 Dokumen	
	Penghitungan perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	Provinsi Lampung	Jumlah laporan hasil penghitungan perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	1 Laporan	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	60%	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	7 dokumen	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	7 dokumen	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	22 Laporan	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	11 Laporan	
	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	11 Laporan	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Persentase Bauran Energi Daerah	34,80%	
	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari	10%	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	30 Laporan	

	Penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kearah perairan kepulauan		Persentase izin pemanfaatan panas bumi yang diawasi /di evaluasi	100%	
	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas atau kearah perairan kepulauan	Provinsi Lampung	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas atau kearah perairan kepulauan	8 Laporan	
	Penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kearah perairan kepulauan	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kearah perairan kepulauan	4 Dokumen	
	Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kearah perairan kepulauan	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mill diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kearah perairan kepulauan	4 Dokumen	
	Penatausahaan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi		Persentase usaha yang memiliki izin surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang	8%	
	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan	8 Dokumen	
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100%	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Data guna Penyusunan Neraca Energi Daerah	5 Dokumen	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Provinsi Lampung	Jumlah Orang yang menerima manfaat dan teknologi Konservasi Energi	300 Orang	
	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Provinsi Lampung	Jumlah Penerima Manfaat Fasilitas/Gedung milik Pemerintah yang dilakukan Efisiensi Energi Listrik	4 Unit	
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	100%	
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi	100%	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	8 Laporan	

	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung	100%	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri		Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun	100%	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	7 Laporan	
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan		Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun	100%	
	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	13 Dokumen	
	Penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Provinsi Lampung	Jumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	3000 Keluarga	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	3 Unit	
	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	13 Laporan	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen yang terkumpul terkait Data Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	13 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

2.6. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai Instansi yang memiliki tugas melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung selalu mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Lampung yaitu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 serta kebijakan yang termuat dalam dokumen penyusunan perencanaan yang setiap tahun diterbitkan oleh Pemerintah yang menekankan pada 7 agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu :



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif, teknokratik, politik serta *Top down* dan *Bottom up*. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah yang menurut kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pola Working Plan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan yang disusun dari tahapan yang memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down* ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka menjaga sinergitas perencanaan pembangunan perlu dicermati kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”



Adapun tujuan pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung adalah “***Terwujudnya Ketahanan dan Kemadirian Energi Menuju Lampung Berjaya***”.

Sasaran Pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung akan di fokuskan pada:

- 1. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Ketahanan dan Kemadirian Energi Menuju Lampung Berjaya	Rasio Dusun Berlistrik (%) Persentase EBT dalam bauran energi	1. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung 2. Meningkatnya pelayanan dan kualitas infrastruktur energi	Rasio Dusun Berlistrik Persentase EBT dalam bauran energi

2.8. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Lebih lanjut, penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan pada pada tahun 2024 pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang direncanakan untuk periode Tahun 2024 adalah sebagai berikut:





I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan/Material
4. Fasilitas Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
2. Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provnsi

1. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah

III. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

a. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

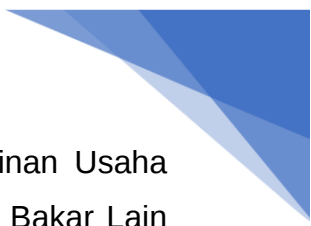
1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

b. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
2. Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut

IV. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

a. Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

- 
1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

b. Pengelolaan penyediaan biomassa dan biogas dalam wilayah provinsi

1. Penyusunan dan pemukthairan data potensi biomassa
2. Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi, dan pelaporan biogas
3. Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas
4. Penyusunan dan pemukthairan data potensi biogas

c. Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi

d. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

1. Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
2. Perencanaan kegiatan konservasi energi

e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat provinsi

1. Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat

V. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

a. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

b. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

c. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam



Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri

d. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan

1. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan
2. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dijabarkan pada tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung									
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI				20.633.454.418,50	APBD			37.674.915.765,00
3.29	BIDANG URUSAN								
3.29.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada		100%	16.303.454.418,50	APBD		100%	20.629.915.765,00
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		100%	167.356.000,00	APBD		100%	1.650.000.000,00
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas ESDM	12 Dokumen	16.126.000,00	APBD		16 Dokumen	300.000.000,00
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas ESDM	3 Dokumen	116.230.000,00	APBD		5 Dokumen	350.000.000,00
	Koordinasi dan penyusunan DPA perangkat daerah	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		3 Dokumen	200.000.000,00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		3 Dokumen	200.000.000,00
	Koordinasi dan penyusunan DPA Perubahan SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD dan laporan hasil koordinasi	Dinas ESDM	-	-	-		3 Dokumen	200.000.000,00
	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		4 Laporan	200.000.000,00
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas ESDM	6 Laporan	35.000.000,00	APBD		4 Laporan	200.000.000,00

3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah		100%	13.666.521.018,00	APBD		100%	15.086.829.454,00
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas ESDM	1582 Org/Bln	13.656.401.018,00	APBD		105 Orang/Bulan	14.901.829.454,00
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinas ESDM	-	-	-		2 Dokumen	25.000.000,00
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian, verifikasi, keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian, verifikasi, keuangan SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		2 Dokumen	25.000.000,00
	Koordinasi pelaksanaan akutansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan akutansi SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		2 Dokumen	25.000.000,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan dan hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		8 Laporan	30.000.000,00
	Pengelolaan dan penyiapan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan tanggapan pemeriksaan	Dinas ESDM	-	-	-		10 Dokumen	30.000.000,00
3.29.01.1.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	Dinas ESDM	6 Laporan	10.120.000,00	APBD		30 Laporan	50.000.000,00
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia		100%	50.000.000,00	APBD		100%	83.706.505,00
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	2 Laporan	15.000.000,00	APBD		1 Laporan	25.000.000,00
3.29.01.1.05.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	7 Laporan	35.000.000,00	APBD		7 Laporan	58.706.505,00

3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada		100%	100.000.000,00	APBD		100%	235.000.000,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Dinas ESDM	-	-	-		120 Paket	60.000.000,00
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas ESDM	20 orang	100.000.000,00	APBD		20 Orang	175.000.000,00
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada		100%	799.622.485,50	APBD		100%	1.406.919.806,00
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas ESDM	13 Paket	16.790.000,00	APBD		30 Paket	40.884.000,00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Dinas ESDM	460 Paket	46.000.000,00	APBD		860 Paket	107.250.000,00
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas ESDM	-	0,00	APBD		125 Dokumen	30.000.000,00
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Dinas ESDM	2347 Buah	168.432.000,00	APBD		2347 Paket	202.500.000,00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas ESDM	415 Laporan	25.775.000,00	APBD		451 Laporan	35.000.000,00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas ESDM	148 Laporan	542.625.485,50	APBD		150 Laporan	991.285.806,00
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	143.821.000,00	APBD		100%	150.000.000,00
3.29.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Dinas ESDM	14 Paket	72.293.000,00	APBD		7 unit	50.000.000,00
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Dinas ESDM	4 Unit	71.528.000,00	APBD		7 unit	100.000.000,00

3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	724.833.915,00	APBD		100%	733.060.000,00
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas ESDM	12 Laporan	197.558.915,00	APBD		12 laporan	250.800.000,00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas ESDM	36 Laporan	527.275.000,00	APBD		36 laporan	482.260.000,00
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	651.300.000,00	APBD		100%	1.284.400.000,00
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas ESDM	7 Unit	393.080.000,00	APBD		12 Unit	859.400.000,00
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Dinas ESDM	88 Unit	44.220.000,00	APBD		105 unit	75.000.000,00
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas ESDM	1 Unit	214.000.000,00	APBD		3 Unit	350.000.000,00
3.29.01.2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian		61%	600.000.000,00	APBD		100%	1.980.000.000,00
3.29.01.2.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah		67,5%	480.000.000,00	APBD		100%	1.120.000.000,00
3.29.01.2.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam	Provinsi Lampung	44 Dokumen	290.480.000,00	APBD		45 Dokumen	500.000.000,00
3.29.01.2.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Jumlah Dokumen Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	2 Dokumen	189.520.000,00	APBD		1 Dokumen	250.000.000,00
	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Provinsi Lampung	-	-	-		1 Dokumen	370.000.000,00

3.29.01.2.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA		45%	120.000.000,00	APBD		100%	860.000.000,00
	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perolehan air tanah	Jumlah dokumen data nilai perolehan air tanah dalam provinsi	Provinsi Lampung	-	-	-		15 Dokumen	195.000.000,00
	Penghitungan perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	Jumlah laporan hasil penghitungan perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	Provinsi Lampung	-	-	-		15 Laporan	275.000.000,00
3.29.01.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	15 Laporan	120.000.000,00	APBD		30 Laporan	390.000.000,00
3.29.01.3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara		60%	858.475.200,00	APBD		60%	1.700.000.000,00
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		7 dokumen	358.475.200,00	APBD		7 dokumen	200.000.000,00
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Provinsi Lampung	7 dokumen	358.475.200,00	APBD		7 dokumen	200.000.000,00
3.29.03.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		22 Laporan	500.000.000,00	APBD		22 Laporan	1.500.000.000,00
3.29.03.1.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Provinsi Lampung	11 Laporan	250.000.000,00	APBD		11 Laporan	1.000.000.000,00
3.29.01.3.03.04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Provinsi Lampung	11 Laporan	250.000.000,00	APBD		11 Laporan	500.000.000,00

3.29.01.5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Bauran Energi Daerah		34,80%	1.400.000.000,00	APBD		34,8%	3.900.000.000,00
3.29.01.5.03	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari		10%	300.000.000,00	APBD		10%	800.000.000,00
3.29.01.5.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Provinsi Lampung	12 Laporan	300.000.000,00	APBD		1 Laporan	800.000.000,00
3.29.05.01.5	Pengelolaan penyediaan biomassa dan biogas dalam wilayah provinsi	Persentase Pengelolaan penyediaan biomassa dan biogas dalam wilayah provinsi	Provinsi Lampung	100%	700.000.000,00				2.050.000.000,00
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah dokumen data potensi biomassa	Provinsi Lampung	1 Dokumen	42.000.000,00	APBD		1 Dokumen	400.000.000,00
3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi, dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksana pemberian bimtek, supervisi, evaluasi, dan pelaporan biogas	Provinsi Lampung	3 Laporan	99.000.000,00	APBD		1 Dokumen	400.000.000,00
3.29.05.1.05.0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Provinsi Lampung	3 Laporan	530.000.000,00	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000,00
3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah dokumen data potensi biomassa	Provinsi Lampung	1 Dokumen	29.000.000,00	APBD		1 Dokumen	250.000.000,00
3.29.05.1.08	Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Persentase pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Provinsi Lampung	100%	120.000.000,00				250.000.000,00
3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Provinsi Lampung	7 Laporan	120.000.000,00	APBD		7 Laporan	250.000.000,00

3.29.05.1.09	Pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Persentase pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Provinsi Lampung	100%	188.000.000,00	APBD		100%	400.000.000,00
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Provinsi Lampung	9 Unit	50.000.000,00	APBD		1 Laporan	400.000.000,00
3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	Provinsi Lampung	1 Dokumen	138.000.000,00	APBD		-	-
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi	Persentase pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi	Provinsi Lampung	100%	92.000.000,00				400.000.000,00
3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Provinsi Lampung	7 Laporan	92.000.000,00	APBD		7 Laporan	400.000.000,00
3.29.01.6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi		100%	1.471.524.800,00	APBD		100%	9.465.000.000,00
3.29.01.6.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi		100%	250.000.000,00	APBD		100%	805.000.000,00
3.29.01.6.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	20 Laporan	250.000.000,00	APBD		84 Laporan	805.000.000,00

3.29.01.6.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung		100%	100.000.000,00	APBD		100%	230.000.000,00
3.29.01.6.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	6 Laporan	100.000.000,00	APBD		12 Laporan	230.000.000,00
3.29.01.6.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun		100%	621.524.800,00	APBD		-	-
3.29.01.6.05.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Provinsi Lampung	7 Laporan	621.524.800,00	APBD		-	-
3.29.01.6.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun		100%	500.000.000,00	APBD		100%	8.430.000.000,00
3.29.01.6.06.2	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Provinsi Lampung	50 Unit	250.000.000,00	APBD		200 Unit	1.610.000.000,00
	Penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Jumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Provinsi Lampung	-	-	-		1500 Keluarga	5.250.000.000,00
	Pengendalian dan pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu	Provinsi Lampung	-	-	-		7 Laporan	420.000.000,00
	Pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana penyedia tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil	Jumlah hasil laporan pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana penyedia tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil	Provinsi Lampung	-	-	-		12 Laporan	200.000.000,00
	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sasaran pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan	Jumlah dokumen hasil pendataan dusun yang belum berlistrik serta evaluasi potensi sumber EBT pada dusun yang belum berlistrik	Provinsi Lampung	-	-	-			375.000.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan	Provinsi Lampung	-	-	-		12 Laporan	325.000.000,00
3.29.01.6.06.7	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Dokumen yang terkumpul terkait Data Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Provinsi Lampung	6 Dokumen	250.000.000,00	APBD		7 Dokumen	250.000.000,00
			Jumlah Pagu		20.633.454.418,50		Jumlah Pagu		37.674.915.765,00

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

2.9. Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuh Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, dan Target Tahun 2024 serta Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perumusan Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 terdiri dari 5 Program dan 21 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yang ditekankan pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi menuju lampung berjaya. Program dan kegiatan dimaksud yaitu:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2024 serta Perkiraan Maju Rencana Tahun2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung									
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI				20.633.454.418,50	APBD			37.674.915.765,00
3.29	BIDANG URUSAN								
3.29.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada		100%	16.303.454.418,50	APBD		100%	20.629.915.765,00
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusunn		100%	167.356.000,00	APBD		100%	1.650.000.000,00
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas ESDM	12 Dokumen	16.126.000,00	APBD		16 Dokumen	300.000.000,00
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas ESDM	3 Dokumen	116.230.000,00	APBD		5 Dokumen	350.000.000,00
	Koordinasi dan penyusunan DPA perangkat daerah	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		3 Dokumen	200.000.000,00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		3 Dokumen	200.000.000,00
	Koordinasi dan penyusunan DPA Perubahan SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD dan laporan hasil koordinasi	Dinas ESDM	-	-	-		3 Dokumen	200.000.000,00
	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		4 Laporan	200.000.000,00
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas ESDM	6 Laporan	35.000.000,00	APBD		4 Laporan	200.000.000,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah		100%	13.666.521.018,00	APBD		100%	15.086.829.454,00
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas ESDM	1582 Org/Bln	13.656.401.018,00	APBD		105 Orang/Bulan	14.901.829.454,00
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinas ESDM	-	-	-		2 Dokumen	25.000.000,00
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian, verifikasi, keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian, verifikasi, keuangan SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		2 Dokumen	25.000.000,00
	Koordinasi pelaksanaan akutansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan akutansi SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		2 Dokumen	25.000.000,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan dan hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas ESDM	-	-	-		8 Laporan	30.000.000,00
	Pengelolaan dan penyiapan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan tanggapan pemeriksaan	Dinas ESDM	-	-	-		10 Dokumen	30.000.000,00
3.29.01.1.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	Dinas ESDM	6 Laporan	10.120.000,00	APBD		30 Laporan	50.000.000,00
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia		100%	50.000.000,00	APBD		100%	83.706.505,00
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	2 Laporan	15.000.000,00	APBD		1 Laporan	25.000.000,00
3.29.01.1.05.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	7 Laporan	35.000.000,00	APBD		7 Laporan	58.706.505,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada		100%	100.000.000,00	APBD		100%	235.000.000,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Dinas ESDM	-	-	-		120 Paket	60.000.000,00
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas ESDM	20 orang	100.000.000,00	APBD		20 Orang	175.000.000,00
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada		100%	799.622.485,50	APBD		100%	1.406.919.806,00
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas ESDM	13 Paket	16.790.000,00	APBD		30 Paket	40.884.000,00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Dinas ESDM	460 Paket	46.000.000,00	APBD		860 Paket	107.250.000,00
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas ESDM	-	0,00	APBD		125 Dokumen	30.000.000,00
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Dinas ESDM	2347 Buah	168.432.000,00	APBD		2347 Paket	202.500.000,00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas ESDM	415 Laporan	25.775.000,00	APBD		451 Laporan	35.000.000,00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas ESDM	148 Laporan	542.625.485,50	APBD		150 Laporan	991.285.806,00
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	143.821.000,00	APBD		100%	150.000.000,00
3.29.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Dinas ESDM	14 Paket	72.293.000,00	APBD		7 unit	50.000.000,00
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Dinas ESDM	4 Unit	71.528.000,00	APBD		7 unit	100.000.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	724.833.915,00	APBD		100%	733.060.000,00
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas ESDM	12 Laporan	197.558.915,00	APBD		12 laporan	250.800.000,00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas ESDM	36 Laporan	527.275.000,00	APBD		36 laporan	482.260.000,00
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	651.300.000,00	APBD		100%	1.284.400.000,00
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas ESDM	7 Unit	393.080.000,00	APBD		12 Unit	859.400.000,00
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Dinas ESDM	88 Unit	44.220.000,00	APBD		105 unit	75.000.000,00
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas ESDM	1 Unit	214.000.000,00	APBD		3 Unit	350.000.000,00
3.29.01.2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian		61%	600.000.000,00	APBD		100%	1.980.000.000,00
3.29.01.2.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah		67,5%	480.000.000,00	APBD		100%	1.120.000.000,00
3.29.01.2.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam	Provinsi Lampung	44 Dokumen	290.480.000,00	APBD		45 Dokumen	500.000.000,00
3.29.01.2.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Jumlah Dokumen Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	2 Dokumen	189.520.000,00	APBD		1 Dokumen	250.000.000,00
	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Provinsi Lampung	-	-	-		1 Dokumen	370.000.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.01.2.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA		45%	120.000.000,00	APBD		100%	860.000.000,00
	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perolehan air tanah	Jumlah dokumen data nilai perolehan air tanah dalam provinsi	Provinsi Lampung	-	-	-		15 Dokumen	195.000.000,00
	Penghitungan perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	Jumlah laporan hasil penghitungan perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	Provinsi Lampung	-	-	-		15 Laporan	275.000.000,00
3.29.01.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	15 Laporan	120.000.000,00	APBD		30 Laporan	390.000.000,00
3.29.01.3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara		60%	858.475.200,00	APBD		60%	1.700.000.000,00
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		7 dokumen	358.475.200,00	APBD		7 dokumen	200.000.000,00
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Provinsi Lampung	7 dokumen	358.475.200,00	APBD		7 dokumen	200.000.000,00
3.29.03.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		22 Laporan	500.000.000,00	APBD		22 Laporan	1.500.000.000,00
3.29.03.1.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Provinsi Lampung	11 Laporan	250.000.000,00	APBD		11 Laporan	1.000.000.000,00
3.29.01.3.03. 04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Provinsi Lampung	11 Laporan	250.000.000,00	APBD		11 Laporan	500.000.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.01.5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Bauran Energi Daerah		34,80%	1.400.000.000,00	APBD		34,8%	3.900.000.000,00
3.29.01.5.03	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari		10%	300.000.000,00	APBD		10%	800.000.000,00
3.29.01.5.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Provinsi Lampung	12 Laporan	300.000.000,00	APBD		1 Laporan	800.000.000,00
3.29.05.01.5	Pengelolaan penyediaan biomassa dan biogas dalam wilayah provinsi	Persentase Pengelolaan penyediaan biomassa dan biogas dalam wilayah provinsi	Provinsi Lampung	100%	700.000.000,00				2.050.000.000,00
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah dokumen data potensi biomassa	Provinsi Lampung	1 Dokumen	42.000.000,00	APBD		1 Dokumen	400.000.000,00
3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi, dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksana pemberian bimtek, supervisi, evaluasi, dan pelaporan biogas	Provinsi Lampung	3 Laporan	99.000.000,00	APBD		1 Dokumen	400.000.000,00
3.29.05.1.05.0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Provinsi Lampung	3 Laporan	530.000.000,00	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000,00
3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah dokumen data potensi biomassa	Provinsi Lampung	1 Dokumen	29.000.000,00	APBD		1 Dokumen	250.000.000,00
3.29.05.1.08	Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Persentase pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Provinsi Lampung	100%	120.000.000,00				250.000.000,00
3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahannya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Provinsi Lampung	7 Laporan	120.000.000,00	APBD		7 Laporan	250.000.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

3.29.05.1.09	Pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Persentase pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Provinsi Lampung	100%	188.000.000,00	APBD		100%	400.000.000,00
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Provinsi Lampung	9 Unit	50.000.000,00	APBD		1 Laporan	400.000.000,00
3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	Provinsi Lampung	1 Dokumen	138.000.000,00	APBD		-	-
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi	Persentase pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi	Provinsi Lampung	100%	92.000.000,00				400.000.000,00
3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Provinsi Lampung	7 Laporan	92.000.000,00	APBD		7 Laporan	400.000.000,00
3.29.01.6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi		100%	1.471.524.800,00	APBD		100%	9.465.000.000,00
3.29.01.6.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi		100%	250.000.000,00	APBD		100%	805.000.000,00
3.29.01.6.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	20 Laporan	250.000.000,00	APBD		84 Laporan	805.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2024 disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi saat ini yang diarahkan pada upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi menuju lampung berjaya.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat memacu kinerja seluruh personil/pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, selain itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban terhadap tupoksi mengarah pada objektifitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : Oktober 2024

**KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
LAMPUNG**

FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197302222003121010